BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga, yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam perspektif pembangunan, terdapat periodisasi perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang (25 tahunan) yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), perencanaan jangka menengah (5 tahunan) yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan penjabaran perencanaan (5 tahunan) yang ada di SKPD dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) dan perencanan jangka pendek (tahunan) yang ada di SKPD dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA). Rencana Kerja Dinpermasdes merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional dibandingkan dengan dokumen Renstra.

Komponen-komponen yang terkandung dalam Renja 2024 meliputi sasaran strategis dan sasaran program yang akan dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan. Pada dasarnya Renja tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2024. Target kinerja mempresentasikan nilai kualitatitif yang harus dicapai selama tahun 2024 dan semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mengacu pada arah kebijakan RKPD dan RPJMD

Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 dan juga didasarkan pada antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi, masukan dari berbagai stakeholder dan dinamika perkembangan pembangunan terutama di lingkungan strategis pedesaan serta sinkronisasi Program dan Kegiatan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja yang dilaksanakan Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Purbalingga.

1.2. Landasan Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahu n 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130)

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kapubaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 06);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 140 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 140 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2021 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 merupakan Program dan Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang akan dilaksanakan berdasarkan ketepatan strategi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi. Pembuatan Rencana Kerja ini mempunyai maksud :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugasnya sehingga sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan keuangan daerah dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam APBD tahun 2024.
2. Sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan program kegiatan, sekaligus sebagai tolak ukur di setiap bidang pada Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2024.

b. Tujuan

Penyusunan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tahun 2024 mempunyai tujuan :

1. Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga yang termuat dalam RPJMD tahu 2021-2026 terutama di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Menjabarkan rencana strategis ke rencana operasional
3. Sebagai instrumen untuk mengukur capaian target kinerja penyelenggaraan kegiatan pada Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERMASDES TAHUN 2022.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinpermasdes Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinpermasdes.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinpermasdes

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinpermasdes.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinpermasdes

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERMASDES TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dan waktu yang ditentukan dalam upaya melaksanakan seluruh program dan kegiatan tersebut. Secara umum capaian kinerja program dan kegiatan Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga tahun 2022 dapat dilaksanakan dan mendekati target kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga mengelola APBD sebesar Rp. 5.379.157.000,- yang terdiri dari :

- Belanja Operasi Rp. 5.369.157.000,-
- Belanja Modal Rp. 10.000.000,-

Dengan realisasi sebesar Rp. 5.136.019.067,- atau 95,48 %. yang terdiri dari :

- Belanja Operasi Rp. 5.126.019.067 ,-
- Belanja Modal Rp 10.000.000,-

Realisasi belanja operasi merupakan pengeluaran untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 sejumlah 4 program, 10 kegiatan dan 40 sub kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

Disamping melaksanakan kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten sesuai dengan tupoksi, Dinpermasdes juga melaksanakan fasilitasi dana bantuan untuk desa yang bersumber dari dana APBD Kabupaten berupa ADD dan Bantuan Keuangan Khusus, Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan dana APBN berupa dana transfer Dana Desa kepada pemerintah desa.

Adapun penjelasan terperinci anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Khusus APBD Kabupaten, bantuan keuangan bagi pemerintah desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan dana transfer

Dana Desa dari APBN tahun anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Desa (ADD).

   Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 190 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengaloksian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022, maka Alokasi Dana Desa tahun 2022 adalah sebesar Rp.119.036.714.000,- (Seratus sembilan belas miliar tiga puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) yang dialokasikan untuk 224 desa se Kabupaten Purbalingga. Adapun realisasi penyalurannya adalah sebesar Rp. Rp. 119.036.714.000,- atau 100 %.

2. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Desa.

   Pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang fasilitasi penyaluran dan pelaporannya dilaksanakan oleh OPD terkait termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun dana bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa yang difasilitasi oleh Dinpermasdes Tahun 2022 sejumlah 270 titik kegiatan dengan pagu anggaran Rp.5.000.000 sampai dengan Rp.200.000. Total bantuan Rp. 28.374.482.000,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Bantuan tersebut digunakan antara lain untuk pembangunan rabat beton, pengaspalan jalan, pembuatan talud, pembuatan saluran

3. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten dan Desa memfasilitasi penyaluran dana untuk Pemerintah Desa sebesar Rp. 31.498.000.000,- (Tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.31.448.000 (Tiga

puluh satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) atau sebesar 99,84 %. Alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk :

- Bantuan operasional bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa di 224 desa dengan bantuan masing-masing desa @ sebesar Rp. 5.000.000,- = Rp 1.120.000.000,- (satu miliyar seratus dua puluh juta rupiah)
- Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan sebanyak 251 (dua ratus lima puluh satu) titik kegiatan di 148 Desa dengan besar bantuan sebesar Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- .Total bantuan Rp.29.260.000.000,- dengan realisasi Rp.29.570.000.000,atau 99,84 % tidak cair satu titik di Desa Sindang sebesar Rp.50.000.000.
- Bantuan TMMD yang bersumber dari APBD Provinsi menfasilitasi TMMD Sengkuyung I,II, dan III dengan sejumlah Rp.758.000.000 terdiri dari
  1. Desa Tanalum Kec.Rembang Sebesar Rp.256.000.000
  2. Desa Buara Kec.Karangmoncol Sebesar Rp.251.000.000
  3. Desa Karangjengkol Kec.Kutasari sebesar Rp.251.000.000

4. Transfer Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat.

   Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/20212020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2022, alokasi dana desa tahun 2022 sebesar Rp. 247.368.204.000,- yang dialokasikan untuk 224 desa se Kabupaten Purbalingga, dengan realisasi penyaluran Rp.246.998.927.400 atau sebesar 99,85 %.

   Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan baik dari anggaran APBD Kabupaten yang dikelola langsung Dinpermasdes, Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Purbalingga, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan Dana Transfer dari APBN sebagaimana tersebut diatas terdapat beberapa indikator kinerja yang telah sesuai dengan target yang telah ditentukan, akan tetapi juga terdapat pula beberapa indikator yang belum dapat terukur secara pasti karena dilihat dari segi kemanfaatan dan dampak dari masing-masing kegiatan hanya dapat dilihat dalam jangka waktu yang panjang.

   Adapun Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Purbalingga s/d tahun 2022 dapat disajikan sebagaimana tabel *TC 29* sebagai berikut :

TABEL TC - 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga

	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026 5 tahun		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%) 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja,Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti,Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan	100	%	NA	100	100	100,00	100	100,00	100
	Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100	%	NA	100	100	100,00	100	100,00	100
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	NA	2	2	100,00	2	100,00	100
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Dok	NA	6	6	100,00	6	100,00	100
	Persentase temuan pengelolaan Anggaran yang	100	%	NA	100	100	100,00	100	100,00	100
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	24	Org/Bln	NA	24	24	100,00	24	100,00	100
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas	200	Dok	NA	280	280	100,00	200	100,00	100
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	NA	NA	NA	NA	300	100,00	100
	tersedianya honor admin simda dan sim aset	1	tahun	NA	12	12	100,00	100	100,00	100
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	NA	NA	NA	0,00	1	100,00	100

terlaksananya adminstrasi umum penunjang operasional kantor	12	bln	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	paket	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	paket	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Tersedianya surat kabar dan majalah	12	bln	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	NA	12	12	100,00	1	100,00	100
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bln	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Laporan	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bln	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	12	bln	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28	unit	NA	28	28	100,00	28	100	100
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	unit	NA	1	1	100,00	1	100	100,00

prosentase desa yang melakukan kerjasama aktif (baik kerjasama antardesa dan desa dengan pihak ketiga)	83,04	%	NA	42,86	40	93,33	70,93	55,465	67
Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antardesa	186	desa	NA	42,86	40	93,33	70,93	55,465	30
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	93	Dok	NA	63	37	58,73	73	55	59
Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	93	Dok	NA	82	6	7,32	86	46	49
Prosentase Desa tertib administrasi pemerintahan Desa	58,2	%	NA	NA	56	70,00	44,85	50,425	87
Cakupan Desa yang difasilitasi tertib administrasi pemerintah desa	58,2	%	NA	25	25	-	44,85	34,925	60
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	10	Desa	NA	10	10	100,00	10	10	100
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	224	Desa	NA	224	224	100,00	224	224	100
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	224	Desa	NA	224	224	100,00	224	224	100
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	18	Orang	NA	18	54	100,00	18	36	200
Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	3	Dokumen	NA	3	3	100,00	3	3	100
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	224	Dokumen	NA	168	204	121,43	178	191	85

	Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10	Laporan	NA	NA	0	-	20	10	100
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	239	Dokumen	NA	239	239	100,00	239	239	100
	Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	3	Dokumen	NA	NA	0	-	3	1,5	50
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	224	Dokumen	NA	0	0	-	73	36,5	16
	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	18	Orang	NA	0	0	-	18	9	50
	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3	Dokumen	NA	3	3	100,00	3	3	100
	Prosentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	63,44	%	NA	62,61	60	95,83	63,02	61,51	97
	Prosentase lembaga kemasyarakatan yang dibina di tingkat kab.Purbalingga	63,44	%	NA	62,61	60	95,83	63,02	61,51	97
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5512	Lembaga	NA	354	452	127,68	5476	2964	54

	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	25	Dokumen	NA	212	45	21,23	21	33	132
	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	19	Laporan	NA	10	1	10,00	11	6	32
	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	10	Laporan	NA	234	3	1,28	10	6,5	65
	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	239	Dokumen	NA	239	239	100,00	239	239	100

Analisis kinerja pelayanan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Analisis kinerja pelayanan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga yang berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan melalui Perjanjian Kinerja yang telah dibuat bersama, serta rencana capaian IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Indikator Kinerja Kunci yang dikaji terkait dengan kinerja pelayanan sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga, dijabarkan dalam indikator program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Adapun untuk pencapaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga dan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021 – 2026, sampai dengan tahun 2022 dapat disajikan sebagaimana tabel *T.C. 30* sebagai berikut :

Program Penataan Desa											
Persentase desa yang difasilitasi terkait penyelenggaran penataan desa	-	-	NA	NA	70,54	72,32	NA	NA	NA	70	
Program Peningkatan Kerjasama Desa											
Persentase desa yang melakukan kerjasama aktif baik antar desa maupun pihak ketiga	-	-	40,62	45,09	47,32	49,55	44	45	47	48	
Program Administrasi Pemerintah Desa	-	-									
Persentase Desa tertib administrasi Pemerintah Desa	-	-	60	70	80	90	70	80	80	90	
Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan ,lembaga adat, dan masyarakat hukum adat											
Persentase lembaga kemasyarakatan aktif (pengurus, anggaran, program kerja dan pertemuan)			0	20	20	20	0	20	20	20	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

a. Tingkat kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.

Dalam rangka pelayanan kinerja Dinpermasdes pada Renja Tahun 2024, didukung dengan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga sebanyak 24 orang meliputi :

1. Kepala Dinas	1 orang
2. Sekretaris Dinas	1 orang
3. Kasubag Pelayanan OPD	2 orang
4. Kepala Bidang Teknis	3 orang
5. Sub Koordinator	6 orang
6. JFU / Staf	11 orang
7. PTT/THL	7 orang

b. Permasalahan

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Belum tergalinya potensi Desa secara optimal yang meliputi : potensi ekonomi ,sosial, dan sumber daya manusia
2. Peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui Kelembagaan Masyarakat Desa belum optimal
3. Administrasi dan Tata kelola Pemerintahan Desa perlu ditingkatkan
4. Kurangnya Sarana dan Prasarana Desa

Adapun beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi :

1. Minimnya jumlah aparatur pelaksana tugas dan terbatasnya sarpras sebagai penunjang pelaksanaan tugas di Dinpermasdes
2. Belum meratanya kemampuan/kapasitas aparatur dinpermasdes
3. Minimnya kreatifitas dan inovasi aparatur

c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah :

Dari permasalahan dan hambatan sebagaimana diuraikan di atas, maka dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermasdes yaitu

"Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa" diantaranya yaitu :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan tertib administrasi desa
2. Rendahnya partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa
3. Rendahnya kemampuan desa dalam menggali dan mengembangkan potensi desa.

d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan perangkat daerah :

Tantangan :

Tantangan yang dihadapi Dinpermasdes dalam meningkatkan pelayanan antara lain :

1. Mampu memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas dengan keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana.
2. Pencapaian target kinerja yang optimal sesuai dengan Renstra dan Renja Dinpermasdes dengan keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana

Peluang :

1. Adanya dukungan regulasi dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinpermasdes.
2. Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermasdes
3. Adanya dukungan teknologi yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinpermasdes.

1. Tingkat kemandirian Desa sebagai Basis Pertumbuhan dan Keadilan
2. Peningkatan status desa dari desa berkembang menjadi desa maju dan mandiri.
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa
4. Peningkatan tertib administrasi desa
5. Peningkatan ekonomi desa melalui pengembangan kawasan dan kerjasama desa
6. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa
7. Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga, RPJMD Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem pembangunan nasional. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan RENSTRA SKPD dan RKPD setiap tahunnya.

Dalam penyusunan RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara patrisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan.

Namun demikian tentu masih terdapat berbagai hal yang perlu ditindaklanjuti dengan menyesuaikan beberapa hal yang berkembang selama periode berikutnya, Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Rencana Kerja tahun 2024 harus senantiasa berpedoman pada RENSTRA Dinpermasdes kabupaten PurbalinggaTahun 2021 - 2026 guna menghasilkan rumusan strategi yang terarah, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang sudah ditetapkan dan menjadi rencana prioritas pembangunan pemerintah kabupaten Purbalingga tahun 2024 dalam urusan wajib non pelayanan dasar dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat disajikan dalam *tabel T.C. 31* sebagai berikut :

Tabel T.C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023 KABUPATEN PURBALINGGA

Renja 2024

Nama Perangkat Daerah : DINPERMASDES

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan			
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Ta Cap
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten Purbalingga**	Purbalingga	Persentase ketersediaan laporan kinerja	100%	**3.572.652.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten Purbalingga**	Purbalingga	Persentase ketersediaan laporan kinerja	1
1.	**Perencanaan,Pengganga ran dan Evaluasi**	Purbalingga	Prosentase ketersediaan laporan kinerja	100%	4.568.000	**Perencanaan,Pengga ngaran dan Evaluasi**	Purbalingga	Prosentase ketersediaan laporan kinerja	1
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Purbalingga	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2.493.000	**Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah**	Purbalingga	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokur
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Purbalingga	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2.075.000	**Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	Purbalingga	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapo
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Purbalingga	Prosentase temuan pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	**3.105.957.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Purbalingga	Prosentase temuan pengelolaan Anggaran yang	1
1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Purbalingga	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bula n	3.001.238.000	**Penyediaan gaji dan tunjangan ASN**	Purbalingga	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/B
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	71.200.000	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	Purbalingga	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Doku
3.	Koordinasi dan pelaksanakan Akutansi SKPD	Purbalingga	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	33.519.000	**Koordinasi dan pelaksanakan Akutansi SKPD**	Purbalingga	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokur
3.	**Adminstrasi barang Milik daerah pada Perangkat Daerah**	Purbalingga	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	**2.283.000**	**Adminstrasi barang Milik daerah pada Perangkat Daerah**	Purbalingga	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Lapo

1.	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Purbalingga	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2.283.000	**Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD**	Purbalingga	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapo
4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Purbalingga	terrlaksanaya administrasi umum penunjang	100%	**36.741.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Purbalingga	terrlaksanaya administrasi umum penunjang	1
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Purbalingga	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1.502.000	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik**	Purbalingga	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	P
2.	Penyediaan bahan Logistik kantor	Purbalingga	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	23.453.000	**Penyediaan bahan Logistik kantor**	Purbalingga	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	P
3.	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Purbalingga	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	996.000	**Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	Purbalingga	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Doku
4.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Purbalingga	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4.150.000	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	Purbalingga	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap
5.	penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Purbalingga	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4.150.000	**penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD**	Purbalingga	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap
6.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Purbalingga	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan	2.490.000	**Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**	Purbalingga	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Lap

5.	**Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah daerah**	Purbalingga	Tersedianya jasa penunjang urusan daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan daerah	227.281.000	**Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah daerah**	Purbalingga	Tersedianya jasa penunjang urusan daerah	Tersedia jasa penun urusan da
1.	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Purbalingga	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	558.000	**Penyediaan Jasa Surat-menyurat**	Purbalingga	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap
2.	Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Purbalingga	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	47.040.000	**Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya Air dan Listrik**	Purbalingga	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lap
3.	Peralatan dan Perlengkapan kantor	Purbalingga	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	3.533.000	**Peralatan dan Perlengkapan kantor**	Purbalingga	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lap
4.	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Purbalingga	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	176.150.000	**Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor**	Purbalingga	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lap
6.	**Pemeliharaan barang Milik daerah**	Purbalingga	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**195.822.000**	**Pemeliharaan barang Milik daerah**	Purbalingga	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.	penyediaan Jasa pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan kendaraan Operasional atau Lapangan	Purbalingga	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	178.563.000	penyediaan Jasa pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan kendaraan Operasional atau Lapangan	Purbalingga	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
2.	Pemeliharaan Peralatan dan mesinnya lainnya	Purbalingga	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Unit	6.053.000	Pemeliharaan Peralatan dan mesinnya lainnya	Purbalingga	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	
3	Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan kantor	Purbalingga	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	11.206.000	**Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan kantor**	Purbalingga	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

II	**Program Penataan Desa**	Purbalingga	Prosentase desa yang difasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penataan desa		19.505.000	**Program Penataan Desa**	Purbalingga	Prosentase d yang difasilit terkait denga penyelengga penataan de
1.	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	Purbalingga	Prosentase desa yang difasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penataan desa		19.505.000	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	Purbalingga	Prosentase d yang difasilit terkait denga penyelengga penataan de
1.	fasilitasi tata Wilayah Desa	Purbalingga	Terlakasananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa		2.490.000	**fasilitasi tata Wilayah Desa**	Purbalingga	Terlakasanan Fasilitasi Pen Wilayah Des
2	Fasilitasi penataan kewenangan Desa	Purbalingga	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa		2.490.000	**Fasilitasi penataan kewenangan Desa**	Purbalingga	Terlaksanany Fasilitasi Penataan Kewenangan
3	Fasilitasi Sarana dan prasaran Desa	Purbalingga	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa		14.525.000	**Fasilitasi Sarana dan prasaran Desa**	Purbalingga	Terfasilitasin Sarana dan Prasarana De
III	**Program peningkatan Kerjasama Desa**	Purbalingga	Prosentase desa yang melakukan kerjasama aktif baik antar desa dan dengan pihak ketiga		69.515.000		Purbalingga	Prosentase d yang melaku kerjasama ak baik antar de dan dengan ketiga
1.	**Fasilitasi Kerjasama Antardesa**	Purbalingga	*Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa*		69.515.000	**Fasilitasi Kerjasama Antardesa**	Purbalingga	Jumlah desa difasilitasi kerjasama ar desa
1	Fasilitasi Kerjasama Antardesa dalam Kab/Kota	Purbalingga	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten		7.677.000	**Fasilitasi Kerjasama Antardesa dalam Kab/Kota**	Purbalingga	Jumlah desa difasilitasi kerjasama ar desa dalam kabupaten
2	Fasilitasi Kerjasama Antardesa dengan pihak ketiga dalam Kab/Kota	Purbalingga	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga (termasuk TMMD)		61.838.000	**Fasilitasi Kerjasama Antardesa dengan pihak ketiga dalam Kab/Kota**	Purbalingga	Jumlah Desa difasilitasi kerjasama ar Desa dengan Ketiga (term TMMD)

IV	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	Purbalingga	Persentase Desa tertib administrasi Pemerintah Desa		538.408.000	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	Purbalingga	Persentase Desa tertib administrasi Pemerintah Desa	0
1	**Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi desa**	Purbalingga	*1.Cakupan Desa yang difasilitasi tertib administrasi Pemerintah Desa 2. Cakupan Desa yg melaksanakan perencanaan dan penganggaran tepat waktu 3.Cakupan Desa/kelurahan yg menyusun laporan profil desa tepat waktu*		538.408.000	**Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi desa**	Purbalingga	1.Cakupan Desa yang difasilitasi tertib administrasi Pemerintah Desa 2. Cakupan Desa yg melaksanakan perencanaan dan penganggaran tepat waktu 3.Cakupan Desa/kelurahan yg menyusun laporan profil desa tepat waktu	0
1	**Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Purbalingga	*Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*		10.375.000	**Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Purbalingga	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	0
2	Penyusunan Produk Hukum Desa	Purbalingga	desa yang di fasilitasi penyusunannya		3.776.000	**Penyusunan Produk Hukum Desa**	Purbalingga	Jumlah Produk hukum desa yang di fasilitasi	0
3	Fasilitasi Peny. Perencanaan Pembangunan Desa	Purbalingga	Jumlah Desa yg difasilitasi pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan desa		9.390.000	**Fasilitasi Peny. Perencanaan Pembangunan Desa**	Purbalingga	Jumlah Desa yg difasilitasi pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan desa	0
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Purbalingga	Jumlah desa yg di fasilitasi pengelolaan keuangan, siskeudes		192.836.000	**Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**	Purbalingga	Jumlah desa yg di fasilitasi pengelolaan keuangan, siskeudes	0

5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Purbalingga	Jumlah Pelatih/Trainer Kecamatan yang siap memberi Bintek		238.286.000	**Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**	Purbalingga	Jumlah Pelatih/Trainer Kecamatan yang siap memberi Bintek	
6	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Purbalingga	Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi		4.748.000	**Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa**	Purbalingga	Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi	
7	pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan lembaga Kerjasama antardesa	Purbalingga	Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam pembentukanBUMdes, LKD dan BKAD		17.577.000	**pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan lembaga Kerjasama antardesa**	Purbalingga	Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam pembentukanBUMdes, LKD dan BKAD	
8	Penyelenggaraan pemilihan,Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Purbalingga	Jumlah desa yg di fasilitasi Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		8.300.000	**Penyelenggaraan pemilihan,Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa**	Purbalingga	Jumlah desa yg di fasilitasi Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
9	Penyelenggaraan pemilihan,Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Purbalingga	Jumlah desa yg di fasilitasi Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		4.150.000	**Penyelenggaraan pemilihan,Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa**	Purbalingga	Jumlah desa yg di fasilitasi Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
10	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Purbalingga	Jumlah pendampingan inputing data profil		8.944.000	**Fasilitasi Penyusunan Profil Desa**	Purbalingga	Jumlah pendampingan inputing data profil	
11	fasilitasi manajemen Pemerintahan Desa	Purbalingga	Jumlah Permasalahan desa yang terselesaikan		10.375.000	**fasilitasi manajemen Pemerintahan Desa**	Purbalingga	Jumlah Permasalahan desa yang terselesaikan	
12	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Purbalingga	Jumlah desa yang di fasilitasi pengelolaan aset desa		4.150.000	**Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa**	Purbalingga	Jumlah desa yang di fasilitasi pengelolaan aset desa	
13	pembinaan Peningkatan Kapasitas BPD	Purbalingga	Jumlah Pelatih/Trainer Kecamatan yang siap memberi bintek		6.225.000	**pembinaan Peningkatan Kapasitas BPD**	Purbalingga	Jumlah Pelatih/Trainer Kecamatan yang siap memberi bintek	
14	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Purbalingga	Jumlah desa yg mengikuti pelaksanaan lomba desa tingkat kabupaten		19.276.000	**Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan**	Purbalingga	Jumlah desa yg mengikuti pelaksanaan lomba desa tingkat kabupaten	

V	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ,Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat**	Purbalingga	Presentase lembaga kemasyarakatan aktif (pengurus, anggaran, program kerja, dan pertemuan)		489.672.000	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ,Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat**	Purbalingga	Presentase lembaga kemasyarakatan aktif (pengurus, anggaran, program kerja, dan pertemuan)	0	
1	**Pemberdayaan lembaga kemasyarakatanyang bergerak ,dibidang pemberdayaan Desa dan lembaga adata Tingakat kab/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat**	Purbalingga	*Presentase lembaga kemasyarakatan yg dibina tingkat kabupaten*		489.672.000	**Pemberdayaan lembaga kemasyarakatanyang bergerak ,dibidang pemberdayaan Desa dan lembaga adata Tingakat kab/kota serta Pemberdayaan**	Purbalingga	Presentase lembaga kemasyarakatan yg dibina tingkat kabupaten	0	
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagan ,lembaga kemasyarakatan , Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat	Purbalingga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yg dibina		42.592.000	**Peningkatan Kapasitas Kelembagan ,lembaga kemasyarakatan , Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat**	Purbalingga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yg dibina	0	
2	Fasilitasi penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan lemabga Masyarakat		Jumlah Sarana dan Prasarana		20.751.000		Purbalingga	Jumlah Sarana dan Prasarana	0	
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa meningkatkan pendapatan Asli Desa	Purbalingga	Jumlah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang dibina		8.550.000	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa meningkatkan pendapatan Asli Desa**	Purbalingga	Jumlah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang dibina	0	

4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Purbalingga	Jumlah Posyantekdes yg dibina		17.226.000	**Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna**	Purbalingga	Jumlah Posyantekdes yg dibina	
5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Purbalingga	Jumlah kegiatan gebrak gotong royong dan BBGRM		66.322.000	**Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong**	Purbalingga	Jumlah kegiatan gebrak gotong royong dan BBGRM	
6	Fasilitasi kelembagaan Tim Penggerak PKK penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Purbalingga	Jumlah Kelembagaan PKK Desa/Kel yang dibina		334.231.000	**Fasilitasi kelembagaan Tim Penggerak PKK penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**	Purbalingga	Jumlah Kelembagaan PKK Desa/Kel yang dibina	
			J U M L A H		**4.689.752.000**			**J U M L A H**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik pemerintahan desa dan kelompok masyarakat yang ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga melalui forum Musrenbang Kecamatan maupun musrenbang Kabupaten menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan Program dan Kegiatan untuk Rencana Kerja tahun berjalan dengan mempertimbangkan prioritas Program dan Kegiatan guna pencapaian visi dan misi Kabupaten Purbalingga.

Secara garis besar kegiatan yang diusulkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

- Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyakarat Desa
- Sarana dan Prasarana Kelembagaan Masyarakat Desa berupa : pembangunan gedung Posyandu, PKK, LPMD, Karang Taruna

Adapun beberapa usulan tersebut dapat disajikan sebagaimana *tabel T.C 32* sebagai berikut :

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Purbalingga

DINPERMASDES

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN /VOLUME	CATATAN
1	Pengadaan Sarpras RT, RW, PKK, Posy, LPM,	Bukateja	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kelembagaan Desa	210.000.000	
	Pelatihan Kelembagaan Desa	Bukateja	Terlaksana peningakatn kapasitas kelembagaan		
	Pengadaan Sarpras RT, RW, PKK, Posy, LPM,	Bukateja	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kelembagaan Desa		
2	Pelatihan Kelembagaan Desa	Bobotsari	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kelembagaan Desa	20.000.000	
	Pengadaan Sarpras RT, RW, PKK, Posy, LPM, Karang Taruna		Terlaksana peningakatn kapasitas kelembagaan		
3	Pelatihan Kelembagaan Desa	Karangmoncol	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kelembagaan Desa	30.000.000	
4	Pengadaan Sarpras RT, RW, PKK, Posy, LPM, Karang Taruna (gd PKK)	Mrebet	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kelembagaan Desa	100.000.000	
5	Pengadaan Sarpras RT, RW, PKK, Posy, LPM, Karang Taruna (Gd Posy)	Kertanegara	Terlaksana peningakatn kapasitas kelembagaan	200.000.000	
	Pengadaan Sarpras RT, RW, PKK, Posy, LPM, Karang Taruna (Gd Posy)		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kelembagaan Desa		
6	Pelatihan Kelembagaan Desa	Kalimanah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kelembagaan Desa	10.000.000	
	Pengadaan Sarpras RT, RW, PKK, Posy, LPM, Karang Taruna	Karangreja	Terlaksana peningakatn kapasitas kelembagaan	100.000.000	
7	Pelatihan Kelembagaan Desa	Kemangkon	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kelembagaan Desa	10.000.000	
8	Pelatihan Kelembagaan Desa	Purbalinga	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kelembagaan Desa	10.000.000	
9	Pengadaan Sarpras RT, RW, PKK, Posy, LPM, Karang Taruna		Terlaksana peningakatn kapasitas kelembagaan		
	Pengadaan Sarpras PKK		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kelembagaan Desa		
	Pengadaan sarpras RT, RW, Alat Pemadam		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kelembagaan Desa		
9	Pengadaan Sarpras RT, RW, PKK, Posy, LPM, Karang Taruna (gd PKK)	Padamara	Terlaksana peningakatn kapasitas kelembagaan	10.000.000	
10	Pengadaan Sarpras RT, RW, PKK, Posy, LPM, Karang Taruna	Rembang	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kelembagaan Desa	50.000.000	
11	Pengadaan Sarpras RT, RW, PKK, Posy, LPM, Karang Taruna (Poskamling)	Kejobong	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kelembagaan Desa	50.000.000	
	Pengadaan Sarpras RT, RW, PKK, Posy, LPM, Karang Taruna		Terlaksana peningakatn kapasitas kelembagaan	50.000.000	
	Pelatihan Kelembagaan Desa		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kelembagaan Desa	10.000.000	
	Pengadaan Sarpras RT, RW, PKK, Posy, LPM, Karang Taruna (Sarpras Posyandu)		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kelembagaan Desa	50.000.000	
12	Pengadaan Sarpras RT, RW, PKK, Posy, LPM, Karang Taruna (gd PKK)	kaligondang	Terlaksana peningakatn kapasitas kelembagaan	50.000.000	
	Pelatihan Kelembagaan Desa		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kelembagaan Desa	10.000.000	
13	Pelatihan Kelembagaan Desa	Karanganyar	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kelembagaan Desa	10.000.000	
	Pengadaan Sarpras RT, RW, PKK, Posy, LPM, Karang Taruna		Terlaksana peningakatn kapasitas kelembagaan	50.000.000	
14	Pelatihan Kelembagaan Desa	Kutasari	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kelembagaan Desa	10.000.000	
15	Pengadaan Sarpras RT, RW, PKK, Posy, LPM, Karang Taruna	Karangjambu	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kelembagaan Desa	50.000.000	
	Pelatihan Kelembagaan Desa		Terlaksana peningakatn kapasitas kelembagaan	10.000.000	
	Pengadaan Sarpras RT, RW, PKK, Posy, LPM, Karang Taruna (seragam linmas)		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kelembagaan Desa	500.000.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pengertian pembangunan Nasional menurut Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional meliputi pembangunanan pusat dan daerah. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakn oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pada rencana awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dilaksanakan dengan Visi " Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong" Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai NAWACITA Kedua. Pembangunan wilayah Perdesaan tercantum dalam misi ketiga yakni Pembanguan yang merata dan Berkeadilan antara lain dengan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Terkait penelaahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pembangunan di Perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di desa dengan mendorong desa-desa agar lebih mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Keberhasilan pembangunan tingkat desa akan mendorong dan berimbas pada kemajuan dan keberhasilan Pembangunan Daerah. Sehingga dibutuhkan koordinasi antar pelaku pembangunan yaitu pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.Koordinasi pelaku pembangnan juga mencakup antara pelaksana dengan perencana

pembangunan sehingga mampu tercitanya integrasi, sinkronisasi dajn sinergi baik antar daerah, anatar ruang, antar waktu dan antar fungsi Pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan patrisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mengacu pada review RENSTRA Dinpermasdes periode 2021 - 2026. Amanat yang dipahami dan semangat yang dibangun adalah untuk terus mempercepat pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan untuk kesejahteraan masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berakhlakul karimah.

Untuk mengimplementasikan strategi dirumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga diantaranya :

1. Mendorong peningkatan kualitas pemerintahan dan administrasi desa
2. Mendorong peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat desa
3. Mendorong peningkatan keswadayaan desa melalui pembinaan ekonomi desa dan pengembangan kawasan perdesaan dan kerjasama antar desa
4. Mendorong peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga disusun dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. Masih perlunya fasilitasi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan tertib administrasi desa
2. Masih perlunya dorongan dan motivasi dalam peningkatan ekonomi pedesaan melalui Penataan desa, Pengembangan BUMDES, Kerjasama Desa dan pembangunan kawasan perdesaan, pengembangan Pasar desa dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

3. Perlunya fasilitasi penyaluran dana-dana bagi Pemerintah Desa, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.
4. Perlunya upaya menggali dan mendorong keswadayaan masyarakat desa melalui pengembangan gotong royong masyarakat.
5. Adanya tugas-tugas lain yang diberikan atasan
6. Adanya amanat undang-undang serta peraturan lainnya yang mengikat.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan berpedoman pada RENSTRA Dinpermasdes 2021-2026, maka rencana dan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tahun 2024 terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal, tertuang dalam 5 Program, 10 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Program ini merupakan program rutin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga bertujuan untuk menjamin kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sbb:

   1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah rencana anggaran sebesar Rp.2.493.000,- (tetap) untuk penyusunan dokumen perencanaan Dinpermasdes.
      b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah rencana anggaran Rp.2.075.000,- (tetap) untuk penyusunan dokumen evaluasi dan laporan kinerja Dinpermasdes.
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 3.001.238.000,- (tetap) yang dipergunakan untuk membayar 24 orang ASN Dinpermasdes
      b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp.71.200.000,- (tetap) untuk membayar perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah menghadiri undangan Rapat-rapat,

melaksanakan koordinasi, pembinaan dan kunjungan lapangan, baik dari Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa.

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp. 33.519.000,- (tetap) yang dipergunakan untuk membayar honor pengelolaan keuangan yang meliputi 1 orang PA, 1 orang PPK, 1 orang Bendahara Pengeluaran, 6 orang PPTK, 12 orang, Bendahara Pembantu.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Penatausahaan Barang Milik Daerah Rp.2.283.000,- (tetap) yang dipergunakan untuk membayar honor 1 orang pengurus barang dan 1 orang PPKom.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 1.502.000,- (tetap) yang dipergunakan untuk membeli peralatan instalasi listrik/penerangan bangunan.
   b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 23.453.000,- (tetap) yang dipergunakan untuk membeli perlengkapan logistik kantor berupa : ATK, Kertas, Cover, Bahan-bahan komputer, Alat/bahan/perabot kantor, alat-alat kebersihan, bendera, dll.
   c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 996.000,- (tetap) yang dipergunakan untuk membayar biaya langganan koran.
   d. Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp. 4.150.000,- dipergunakan untuk membayar biaya jamuan tamu, baik tamu dari wilayah kabupaten, kecamatan, desa, maupun tamu dari Provinsi maupun Pusat selama 12 bulan.
   e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Rp. 4.150.000,- yang dipergunakan untuk membayar konsumsi rapat-rapat koordinasi selama 12 bulan.
   f. Dukungan P

g. elaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Rp. 2.490.000,- yang digunakan untuk membayar honor 1 orang pengelola pengelola SIM ASET, 1 orang Admin SIMDA, dan 1 orang Koordinator Operator SIPD.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 558.000,- (tetap) yang dipergunakan untuk membayar biaya pengiriman surat, paket, dll.
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp.47.040.000,- (tetap) yang dipergunakan untuk membayar langganan telepon, internet dan PDAM.
   c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp.3.533.000,- yang dipergunakan untuk membayar iuran pengelolaan sampah, Pajak Bumi dan Bangunan, Sewa peralatan, dll selama 12 bulan.
   d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 176.150.000,- (bertambah Rp.61.200.000,-) yang dipergunakan untuk membayar honor 1 orang tidak tetap SK Bupati dan 5 orang pegawai tidak tetap SK KAdin, dan untuk Tahun 2022 ada tambahan THL 3 orang (operator komputer 2 orang (SLTA & D3) dan 1 orang tenaga kebersihan krn tenaga yang ada pensiun)
   e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Rp. 178.563.000 untuk membayar bahan bakar kendaraan dinas roda dua : 8 unit dan roda empat : 6 unit.
   f. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 6.053.000,- untuk pemeliharaan 10 unit AC, 7 Unit Laptop, 9 Unit PC dan 12 unit Printer yang kondisinya sering rusak.
   g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 11.206.000 untuk pemeliharaan gedung dan halaman kantor, penambahan anggaran diperlukan

untuk perbaikan atap, genteng dan plafond ruang Bidang PAD yang rusak berat.

B. Program Penataan Desa, terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sbb:

1. Penyelenggaraan Penataan Desa

   a. Fasilitasi Tata Wilayah Desa, dengan indikator kinerja terlaksananya fasilitasi penataan wilayah desa, anggaran sebesar Rp. 2.490.000,- yang digunakan untuk membayar belanja ATK, rapat-rapat konsultasi/koordinasi dan Perjalanan Dinas dalam kota

   b. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa, dengan indikator terlaksananya fasilitasi penataan kewenangan desa, anggaran sebesar Rp. 2.490.000,- yang dipergunakan ATK dank Kertas , rapat-rapat konsultasi/koordinasi dan Perjalanan Dinas dalam Kota

   c. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa, dengan indikator kinerja terfasilitasinya sarana dan prasarana desa, anggaran sebesar Rp.14.525.000,- yang dipergunakan untuk fasilitasi penyaluran dana BKK Kabupaten dan Bantuan Gubernur untuk Sarana dan Prasarana Perdesaan, berupa rapat-rapat koordinasi, penjelasan pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban keuangan, serta pengiriman berkas pencairan dan LPJ ke Provinsi Jawa Tengah.

C. Program Peningkatan Kerjasama Desa terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sbb :

1. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

   a. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten, anggaran Rp. 7.677.000,- untuk penyusunan regulasi, rapat-rapat konsultasi/koordinasi, baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi, ceking lapangan/pendampingan ke

desa, sehingga kerjasama yang dilakukan oleh desa didukung oleh dokumen kerjasama yang sah sesuai ketentuan.

b. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga, dengan indikator kinerja terlaksananya fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga, anggaran Rp. 61.838.000,- untuk fasilitasi pelaksanaan kegiatan TMMD di 3 desa dan fasilitasi penerbitan dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga sesuai ketentuan. Fasilitasi yang dilakukan antara lain dengan penyusunan regulasi, rapat koordinasi/konsultasi, pembinaan, dan pendampingan.

C. Program Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sbb :

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa

a. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa dengan indicator Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 10.375.000 kegiatan Belanja ATK,Kertas, Rapat-rapat Fasilitas**i** Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah,Perjalanan Dinas Luar Kota

b. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa, dengan Indikator Jumlah Dokumen hasil penyusunan produk hukum desa, anggaran sebesar Rp. 3.776.000,- kegiatan yang dilaksanakan antara lain penyusunan regulasi, rapat kordinasi/konsultasi, pembinaan dan pendampingan penyusunan dan penerbitan produk hukum desa seperti Perdes dan Perkades, baik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa maupun yang lain.

c. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembanguna Desa, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, anggaran Rp. 9.390.000,- kegiatan yang dilaksanakan Sosialisasi Musrenbangdes kepada semua desa lewat Kecamatan, pendampingan pelaksanaan Musrenbangkec dan Musrenbangdes, serta pendampingan

penyusunan dokumen perencanaan desa, sehingga tersusun RKPDes dan RAPBDes dari 224 desa sesuai ketentuan.

d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Pengelolaan keuangan desa, anggaran sebesar Rp. 192.836.000,- dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain Sosialisasi DD/ADD, pendampingan inputing Siskeudes, Bimbingan Teknis dan Pelatihan, monitoring ke desa-desa serta pemberian bantuan transport untuk para Pendamping Desa di Kabupaten Purbalingga, sehingga tersedia dokumen pengelolaan desa yang benar sesuai ketentuan di 224 desa.

e. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, indikator kinerja Jumlah Pelatih/Trainer yang siap memberi bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, rencana anggaran sebesar Rp. 238.286000,- untuk kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pelatih Tingkat Kecamatan yang selanjutnya akan memberikan Bimbingan Teknis kepada desa-desa di wilayahnya, serta pemberian penghargaan kepada desa-desa yang memiliki potensi dan prestasi.

f. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa**.**

Indikator kinerja adalah Jumlah Dokumen hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa . Rencana anggaran sebesar Rp 4.748.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga untuk kegiatan Belanja ATK, Kertas, Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas dalam daerah .

g. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa.

Indikator kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES dan Lembaga Kerjasama antar Desa, Rencana anggaran Rp. 17.577.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja ATK, Kertas, Bahan Komputer ,Rapat-rapat serta Perjalanan dinas dalam dan Luar daerah

h. Penyelenggaraan ,Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Indikator Kinerja yaitu Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan ,Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa , dengan anggaran sejumlah Rp. 8.300.000,- yang akan digunakan untuk Belanja ATK, Kertas, bahan Komputer dan Perjalanan Dinas Luar Daerah

i. Fasilitasi pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Indikator Kinerja yaitu Jumlah Laporan Fasilitasi pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan anggaran sejumlah Rp. 4.150.000 yang akan digunakan untuk Belanja ATK, Kertas, bahan computer, Rapat-rapat serta Perjalanan Dinas dalam Kota

j. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa.

Indikator kinerja yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Profil Desa . Kegiatan tersebut berupa pelatihan dan pendampingan inputing data pelaporan profil desa. Rencana anggaran sebesar Rp 8.944.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

k. Fasilitasi manajemen Pemerintahan Desa

Indikator kinerja yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Manajemen Pemerintahan Desa . Sub Kegiatan tersebut fasilitasi penyelesaian yang dihadapi Pemerintah Desa. Rencana anggaran sebesar Rp 10.375.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

l. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.

Indikator kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan aset desa , Rencana anggaran Rp. 4.150.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga

m. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD.

Indikator yang ditetapkan kegiatan ini adalah Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan kapasitas sebanyak 18 orang dengan anggaran Rp 6.225.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

n. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa yakni Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan . Rencana Kebutuhan dana sebesar Rp. 19.276.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

D. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terdiri dari :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat.

   Indikator kinerja yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya sejumlah 5112 lembaga , Rencana Anggaran Rp 42.592.00.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

2. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat

   Indikator Kinerja sub kegiatan tersebut yaitu Jumlah sarana dan Prasarana kelembagaan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat dengan besaran Anggaran Rp. 20.751.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten.

3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

   Indikator kinerja yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Rencana Anggaran Rp 8.550.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga

4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat guna.Indikator Kinerja yang ditetapkan pada sub kegiatan pemanfaatan dan pengenalan TTG adalah Jumlah Laporan hasil Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat guna Fasilitasi Rencana anggaran sebesar Rp. 17.226.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

5. Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat.

   Indikator Kinerja yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil laporan hasil Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyrakat . Rencana anggaran sebesar Rp 66.322.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

6. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

   Indikator Kinerja yang ditetapkan pada sub kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga . Rencana anggaran sebesar Rp 334.231.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

Adapun rumusan program dan kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju tahun 2025 OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat disajikan sebagaimana Tabel *T.C. 33* sebagai berikut :

Tabel T.C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinpermasdes

Kabupaten Purbalingga

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	02	01	01	**Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja,Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti,Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah,Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Purbalingga		**3.572.652.000**	**APBD**	**-**		**3.658.523.000**
01	02	01	01	**Perencanaan ,Pengganggaran ,Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	Purbalingga		**4.568.000**				4.568.000
01	02	01	07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan pelaporan OPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.493.000	APBD		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.493.000
01	02	02	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.075.000	APBD		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.075.000

01	02	02	02	**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**		Purbalingga		**3.105.957.000**				3.193.615.000
01	02	02	03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Purbalingga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.001.238.000	APBD		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.025.642.000
01	02	02	08	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	71.200.000	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	87.223.000
01	02	05	01	Koordinasi dan pelaksanaan Akutansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purbalingga	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	33.519.000	APBD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	80.750.000
01	02	05	09	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**2.283.000**	APBD			2.283.000
01	02	06	01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	2.283.000	APBD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	2.283.000
01	02	06	03	**Administrasi Umum Perangkat daerah**		Purbalingga	Daerah pada SKPD	**36.741.000**			Daerah pada SKPD	62.302.000
01	02	06	04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Purbalingga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	1.502.000	APBD		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran	1.502.000
01	02	06	05	Penyediaan Bahan logistik	tersedianya bahan logistik kantor	Purbalingga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23.453.000	APBD		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32.400.000
01	02	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Purbalingga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	996.000	APBD		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.400.000

01	02	06	07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Purbalingga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.150.000	APBD		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000
01	02	06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Purbalingga	Jumlah Rapat rapat Koordinasi	4.150.000	APBD		Jumlah Rapat rapat Koordinasi	10.000.000
01	02	06	09	Dukungan pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Purbalingga	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.490.000	APBD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.000.000
01	02	07	05	**Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintahan daerah**		Purbalingga		**227.281.000**				241.153.000
01	02	07	06	Penyedia Jasa Surat Menyu	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purbalingga	umlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	558.000	APBD		umlah Laporan Penyediaan	1.345.000
01	02	08	01	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	47.040.000	APBD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	45.000.000
01	02	08	02	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.533.000	APBD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8.512.000

01	02	08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	176.150.000	APBD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	186.296.000
01	02	09		pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintah daerah		Purbalingga		**195.822.000**	APBD			154.602.000
01	02	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purbalingga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	178.563.000	APBD		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**113.018.000**
01	02	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6.053.000	APBD		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14.584.000
01	02	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purbalingga	umlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11.206.000	APBD		umlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27.000.000

2				**Program Penataan Desa**	Prosentase yang difasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penataan desa	Purbalingga	Prosentase yang difasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penataan desa	**19.505.000**	APBD			19.505.000
				Penyelenggaraan Penataan Desa	Prosentase yang difasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penataan desa	Purbalingga		19.505.000	APBD		Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya	19.505.000
				Fasilitasi tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Purbalingga	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya	2.490.000	APBD		Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya	2.490.000
				Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangan	Purbalingga	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangan	2.490.000	APBD		Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangan	2.490.000
				Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Purbalingga	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	14.525.000	APBD		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	14.525.000
2	13	03		**Program Peningkatan Kerjasama Desa**		Purbalingga		**69.515.000**	**APBD**			69.515.000
2	13	03	2.01	**Fasilitasi Kerja sama Antar Desa**		Purbalingga		**69.515.000**				69.515.000
				Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya desa yang difasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten	Purbalingga	Jumlah desa yang difasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten	7.677.000	APBD		Jumlah desa yang difasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten	**7.677.000**
				Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Desa yang Difasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah Desa yang Difasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	61.838.000	APBD		Jumlah Desa yang Difasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	61.838.000

				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa tertib administrasi pemerintahan Desa	Purbalingga		**528.483.000**	**APBD**			
				Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa tertib administrasi pemerintahan Desa	Purbalingga		538.858.000	**APBD**			**694.043.000**
				Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Purbalingga	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10.375.000	**APBD**		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10.375.000
04	2	01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Fasilitasi produk hukum desa.	Purbalingga	Jumlah produk hukum desa yang difasilitasi penyusunannya	3.776.000	APBD		Jumlah produk hukum desa yang difasilitasi penyusunannya	3.776.000
04	2	01	03	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan desa	Purbalingga	Jumlah desa yang difasilitasi pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan desa	9.390.000	APBD		Jumlah desa yang difasilitasi pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan desa	9.390.000
04	2	01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.	Terlaksananya Fasilitasi Keuangan Desa	Purbalingga	Jumlah desa yg di fasilitasi pengelolaan keuangan, siskeudes	192.836.000	APBD		Jumlah desa yg di fasilitasi pengelolaan keuangan, siskeudes	192.836.000
04	2	01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.	Terselenggaranya bintek kades dan perangkat.	Purbalingga	jumlah kades dan perangkat yang mengikuti bintek	238.286.000	APBD		jumlah kades dan perangkat yang mengikuti bintek	286.250.000
04	2	01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa.	Terlaksananya evaluasi Peraturan Desa	Purbalingga	Jumlah peraturan desa yang dievaluasi	4.748.000	APBD		Jumlah peraturan desa yang dievaluasi	11.441.000
04	2	01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa.	desa yang difasilitasi dalam pembentukan BUMDes.	Purbalingga	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pembentukan BUMDes.	17.577.000	APBD		Jumlah desa yang difasilitasi dalam pembentukan BUMDes.	42.353.000

04	2	01	11	Penyelenggaraan,pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yg di fasilitasi Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Purbalingga	Jumlah desa yg di fasilitasi Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	8.300.000	APBD		APBD	20.000.000
04	2	01	13	Penyelenggaraan,pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yg di fasilitasi Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Purbalingga	Jumlah desa yg di fasilitasi Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.150.000	APBD		APBD	10.000.000
04	2	01	14	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa.	Jumlah pendampingan inputing data profil	Purbalingga	jumlah pendampingan inputing data profil	8.944.000	APBD		jumlah pendampingan inputing data profil	21.551.000
04	2	01	18	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Permasalahan desa yang terselesaikan	Purbalingga	Jumlah Permasalahan desa yang terselesaikan	10.375.000			0	25.000.000
				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.	Terlaksananya fasilitasi dalam pengelolaan aset desa	Purbalingga	jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan aset desa	4.150.000	APBD		jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan aset desa	10.000.000
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terselenggaranya bintek anggota BPD	Purbalingga	jumlah anggota BPD yang mengikuti bintek	6.225.000	APBD		jumlah anggota BPD yang mengikuti bintek	15.000.000
05	2	01	03	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	jumlah desa yang mengikuti pelaksanaan lomba desa tingkat kabupaten	Purbalingga	jumlah desa yang mengikuti pelaksanaan lomba desa tingkat kabupaten	19.726.000	APBD		jumlah desa yang mengikuti pelaksanaan lomba desa tingkat kabupaten	46.446.000

05	2	01	06	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	Presentase lembaga kemasyarakatan aktif (pengurus, anggaran, program kerja, dan pertemuan)	Purbalingga		**489.672.000**	**APBD**			759.517.000
05	2	01	07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat.	Presentase lembaga kemasyarakatan yg dibina tingkat kabupaten	Purbalingga	Presentase lembaga kemasyarakatan yg dibina tingkat kabupaten	42.592.000	APBD		APBD	102.625.000
				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat.	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Purbalingga	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	20.751.000	APBD	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	APBD	20.751.000
05	2	01	09	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.	Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.	8.550.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	APBD	20.600.000
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Purbalingga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	17.226.000	APBD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	APBD	41.506.000

				Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat	Purbalingga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat	66.322.000	APBD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat	APBD	239.804.000
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	334.231.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	APBD	334.231.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINPERMASDES TAHUN 2023

Rencana Kerja dan Sumber Pendanaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dapat disajikan sebagaimana Tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

KABUPATEN PURBALINGGA

Nama Perangkat Daerah : DINPERMASDES

Kode						Urusan/Bidang Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7
2	13	1				**Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah**		Purbalingga		**3.572.652.000**	**APBD**
2	13	01	2	01		**Perencanaan ,Pengganggaran ,Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**		Purbalingga		**4.568.000**	
2	13	01	2	02	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan pelaporan OPD	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah Dokumen Perencanaan	2.493.000	APBD
2	13	01	2	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.075.000	APBD

2	13	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**		Purbalingga		**3.105.957.000**	
2	13	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Purbalingga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.001.238.000	APBD
2	13	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	71.200.000	APBD
2	13	01	2	02	04	Koordinasi dan pelaksanaan Akutansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purbalingga	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	33.519.000	APBD
2	13	01	2	03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**2.283.000**	APBD
2	13	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.283.000	APBD

2	13	01	06			**Administrasi Umum Perangkat daerah**		Purbalingga	Daerah pada SKPD	**36.741.000**	
2	13	01	02	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Purbalingga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.502.000	APBD
2	13	01	02	06	04	Penyediaan Bahan logistik Kantor	tersedianya bahan logistik kantor	Purbalingga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	23.453.000	APBD
2	13	01	02	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	Purbalingga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	996.000	APBD
2	13	01	02	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Purbalingga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.150.000	APBD
2	13	01	02	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Terlaksananya rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi	Purbalingga	Jumlah Rapat rapat Koordinasi	4.150.000	APBD
2	13	01	02	06	11	Dukungan pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Purbalingga	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.490.000	APBD

2	13	01	2	08		**Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah**		Purbalingga		**227.281.000**	
2	13	01	2	08	01	Penyedia Jasa Surat Menyura	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	558.000	APBD
2	13	01	2	08	02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	47.040.000	APBD
2	13	01	2	08	03	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.533.000	APBD
2	13	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	176.150.000	APBD

2	13	01	2	09		**pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintah daerah**		Purbalingga		**195.822.000**	APBD
2	13	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Purbalingga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	178.563.000	APBD
2	13	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6.053.000	APBD
2	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purbalingga	umlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11.206.000	APBD
2	**13**	**02**				**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Purbalingga**			**19.505.000**	
2	13	02	2	01		Penyelenggaraan Penataan Desa		Purbalingga		19.505.000	
2	13	02	2	01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Terlakasananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	Purbalingga	Jumlah Desa yang terfasilitasi tata wilayahnya	2.490.000	
2	13	02	2	01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa		Purbalingga	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan kewenangannya	2.490.000	
2	13	02	2	01	04	Fasilitasi Sarana dan prasarana Desa		Purbalingga	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	14.525.000	

2	13	03				**Program Peningkatan Kerjasama Desa**		Purbalingga		**69.515.000**	**APBD**
2	2	03	2	01		**Fasilitasi Kerja sama Antar Desa**		Purbalingga		**69.515.000**	**APBD**
2	2	03	2	01	01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terselaksananya desa yang difasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten	Purbalingga	Jumlah desa yang difasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten	7.677.000	APBD
2	2	03	2	01	02	Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Desa yang Difasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah Desa yang Difasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	61.838.000	APBD
2	13	04				**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	Persentase Desa tertib administrasi pemerintahan Desa	Purbalingga		**538.408.000**	**APBD**
2	13	04	2	01		Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa tertib administrasi pemerintahan Desa	Purbalingga		538.408.000	
2	13	04	2	01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Adminstrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Adminstrasi Pemerintahan Desa	Purbalingga	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi pemerintahan Desa	10.375.000	

2	13	04	2	01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Fasilitasi produk hukum desa.	Purbalingga	Jumlah produk hukum desa yang difasilitasi penyusunannya	3.776.000	APBD
2	13	04	2	01	03	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan desa	Purbalingga	Jumlah desa yang difasilitasi pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan desa	9.390.000	APBD
2	13	04	2	01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.	Terlaksananya Fasilitasi Keuangan Desa	Purbalingga	Jumlah desa yg di fasilitasi pengelolaan keuangan, siskeudes	192.836.000	APBD
2	13	04	2	02	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.	Terselenggaranya bintek kades dan perangkat.	Purbalingga	jumlah kades dan perangkat yang mengikuti bintek	238.286.000	APBD
2	13	04	2	02	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa.	Terlaksananya evaluasi Peraturan Desa	Purbalingga	Jumlah peraturan desa yang dievaluasi	4.748.000	APBD
2	13	04	2	02	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa.	desa yang difasilitasi dalam pembentukan BUMDes.	Purbalingga	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pembentukan BUMDes.	17.577.000	APBD
2	13	04	2	02	09	Penyelenggaraan,pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yg di fasilitasi Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Purbalingga	Jumlah desa yg di fasilitasi Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	8.300.000	APBD

2	13	04	2	02	10	Penyelenggaraan,pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yg di fasilitasi Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Purbalingga	Jumlah desa yg di fasilitasi Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.150.000	APBD
2	13	04	2	02	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa.	Jumlah pendampingan inputing data profil	Purbalingga	jumlah pendampingan inputing data profil	8.944.000	APBD
2	13	04	2	02	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Permasalahan desa yang terselesaikan	Purbalingga	Jumlah Permasalahan desa yang terselesaikan	10.375.000	
2	13	04	2	02	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.	Terlaksananya fasilitasi dalam pengelolaan aset desa	Purbalingga	jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan aset desa	4.150.000	APBD
2	13	04	2	02	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terselenggaranya bintek anggota BPD	Purbalingga	jumlah anggota BPD yang mengikuti bintek	6.225.000	APBD
2	13	04	2	02	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	jumlah desa yang mengikuti pelaksanaan lomba desa tingkat kabupaten	Purbalingga	jumlah desa yang mengikuti pelaksanaan lomba desa tingkat kabupaten	19.276.000	APBD

2	13	05				**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	Presentase lembaga kemasyarakatan aktif (pengurus, anggaran, program kerja, dan pertemuan)	Purbalingga		**489.672.000**	**APBD**
2	13	05	2	01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat kabupaten /Kota serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama pelakunya	Presentase lembaga kemasyarakatan yg dibina tingkat kabupaten	Purbalingga		489.672.000	
2	13	05	2	01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Purbalingga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	42.592.000	APBD

2	13	06	3	01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Purbalingga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20.751.000	APBD
2	13	06	3	01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	8.550.000	APBD
2	13	06	3	01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Purbalingga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	17.226.000	APBD

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat OPD, sebagai wujud nyata dan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan daerah. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menampung aspirasi atau masukan-masukan dari berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis partisipatif masyarakat, dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka menciptakan *Good Governance* sesuai dengan paradigma pembangunan saat ini. Dimana pada gilirannya akan mampu menciptakan sebuah kebijakan yang lebih efektif, efisien dan ekonomis yang memiliki dampak lebih besar kepada masyarakat. Dengan demikian kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam program dan kegiatan dapat dirasakan masyarakat, khususnya oleh masyarakat pedesaan maupun masyarakat pada umumnya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga selain menjadi acuan pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun anggaran 2024, berfungsi pula sebagai sarana dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga sesuai dengan kemampuan sumber daya maupun kemampuan anggaran yang tersedia.

Rencana kerja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa yang akan datang oleh para pimpinan dan seluruh staf OPD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga, sehingga akan memperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya sangat kami harapkan, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Purbalingga.

Demikian Rencana Kinerja (RENJA) ini dususun sebagai untuk dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024, semoga bisa memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Purbalingga, Juni 2024

KEPALA DINPERMASDES
KABUPATEN PURBALINGGA

ATO SUSANTO,A.P,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670706 199311 1 001